



MODUL AJAR

BAB 1

HAKIKAT PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL

Disusun Oleh :

Kelompok 1

TAHUN AJARAN 2021/2022

NAMA ANGGOTA KELOMPOK 1

1. Amanda Surya Widiyati	(2053053020)	Absen 06
2. Destiana Puanda Ashari	(2053053021)	Absen 14
3. Dewi Nurhanifah	(2053053025)	Absen 15
4. Diva Syafira Rahmadani	(2053053001)	Absen 16
5. Mukti Setiawan	(2053053003)	Absen 31
6. Nurulita Kurniasih	(2053053006)	Absen 36
7. Vinsensius Asto AP	(2053053017)	Absen 46

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia – Nya, kami sebagai tim penyusun dapat menyelesaikan modul ajar yang ber- judul “Hakikat Pendidikan Nilai dan Moral” ini dengan baik dan tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam pembuatan modul ajar ini, kami mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dayu Rika, S.Pd., M.Pd. dan Bapak Drs. Rapani, M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Pendidikan Nilai Moral.
2. Rekan – rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan untuk penyelesaian modul ajar ini.

Tim penyusun menyadari dalam penyusunan modul ajar ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, tim penyusun berharap agar para pembaca dapat memberi kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan modul ajar ini.

Metro, 15 November 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN	3
PEMBAHASAN	4
Analisis Isu	39
Daftar Pustaka.....	41

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Nilai dan Moral sendiri, ada banyak pengertian mengenai nilai dan moral menurut para ahli. Salah satunya pengertian moral menurut Bertenz(2007: 4) menjelaskan definisi arti kata moral berasal dari bahasa latin *mos*(jamak: *mores*) yang berarti: kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan bahasa latin, termasuk bahasa Indonesia, kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama. Secara etimologi kata "etika" sama dengan etimologi kata "moral" karena keduanya berassal dari kata yang berarti adat kebiasaan.

Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak berada di dalam dunia yang empiris. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruk, indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, adil dan tidak adil, dan lain sebagainya. Pandangan seseorang tentang semua itu, tidak bisa diraba, kita hanya mungkin dapat mengetahuinya dari perilaku yang bersangkutan. Oleh karena itulah nilai pada dasarnya standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang tentang baik dan tidak baik, indah dan tidak indah, dan lain sebagainya. Sehingga standar itu yang akan mewarnai perilaku seseorang. Dengan demikian, pendidikan nilai pada dasarnya proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan oleh karenanya peserta didik dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggapnya baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Tujuan dari Pendidikan Nilai dan Moral yaitu membentuk warga negara yang baik. Pembelajaran ini dapat dipergunakan untuk menanamkan pendidikan nilai, moral dan norma secara terus menerus, sehingga warga negara tidak hanya cerdas secara akademik juga memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya konteks nilai, moral, dan norma menjadi karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Terlebih jika mengingat kenyataan bahwa bangsa Indonesia sekarang sedang mengalami krisis jati diri, sehingga nilai moral dan norma menjadi hal yang penting untuk membentengi krisis jati diri bangsa ini.

Pendidikan bertujuan bukan hanya membentuk manusia yang cerdas otaknya dan trampil dalam melaksanakan tugas, namun diharapkan menghasilkan manusia yang memiliki moral. Oleh karena itu pendidikan tidak semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mentransfer nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan transfer moral bersifat universal, diharapkan peserta didik dapat menghargai kehidupan orang lain tercermin dalam tingkah laku serta aktualisasi diri, semenjak usia SD hingga kelak dewasa menjadi warga negara yang baik (good citizen).

PEMBAHASAN

A. KONSEP NILAI DAN PENDIDIKAN NILAI

Pada dasarnya, Pendidikan Nilai dapat dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan nilai. Ketika dua istilah itu disatukan, arti keduanya menyatu dalam definisi Pendidikan Nilai. Namun, karena arti pendidikan dan arti nilai dimaksud dapat dimaknai berbeda, definisi Pendidikan Nilai-pun dapat beragam bergantung pada tekanan dan rumusan yang diberikan pada kedua istilah itu.

Nilai menurut Djahiri (1999), adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Nilai berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Menurut Diktionary (Winataputra: 1989), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu, artinya sesuatu dianggap memiliki nilai apabila secara intrinsik memang berharga. Selanjutnya pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai kedalam diri anak didik.

Sastrapratedja (Kaswardi, 1993) menyebutkan bahwa Pendidikan Nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Dalam pengertian yang hampir sama, Mardiatmadja (1986) mendefinisikan Pendidikan Nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan Nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, akan tetapi mencakup keseluruhan program pendidikan. Hakam (2000: 05) mengungkapkan bahwa Pendidikan Nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut moral dan sudut pandang non moral, meliputi estetika, yakni menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, dan etika yaitu menilai benar atau salahnya dalam hubungan antarpribadi. Dari tiga definisi di atas, dapat dimaknai bahwa Pendidikan Nilai adalah proses bimbingan melalui suritauladan, pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara.

Dari beberapa pengertian tentang Pendidikan Nilai dapat ditarik suatu definisi Pendidikan Nilai yang mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten.

Di dalam proses Pendidikan Nilai, tindakan-tindakan pendidikan yang lebih spesifik dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih khusus sebagaimana diungkapkan Komite APEID (Asia and the Pasific Programme of Education Innovaton for Depelopment) bahwa Pendidikan Nilai secara khusus ditujukan untuk: a) menerapkan pembentukan nilai kepada peserta didik, b) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, dan c) membimbing perilaku yang konsisten dengan nilainilai tersebut. Dengan demikian, Pendidikan Nilai meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai. Sementara Winecoff (1985:1-3) mengungkapkan bahwa tujuan Pendidikan Nilai adalah sebagai berikut: “Purpose of Values Education is process of helping students to explore exiting values through critical examination in order that they might raise of improve the quality of their thingking and feeling”. Pendidikan Nilai membantu peserta didik dengan melibatkan proses-proses sebagai berikut : a. Identification of a core of personal and social values (Adanya proses identifikasi nilai personal dan nilai sosial terhadap stimulasi yang diterima). b. Philosophical and rational inquiry into the core (Adanya penyelidikan secara rasional dan filosofis terhadap inti nilai-nilai dari stimulus yang diterima). c. Affective or emotive response to the core (Respon afektif dan respon emotif terhadap inti nilai tersebut). d. Decision-making related to the core based on inquiry and response (Pengambilan keputusan berupa nilai-nilai dan perilaku terhadap stimulus, berdasarkan penyelidikan terhadap nilai-nilai yang ada dalam dirinya).

Sasaran yang hendak dituju dalam Pendidikan Nilai adalah penanaman nilai-nilai luhur ke dalam diri peserta didik. Pendidikan Nilai seyogianya dikembangkan pada diri dan bersifat umum untuk setiap orang. Pendidikan Nilai merupakan proses membina makna-makna yang esensial, karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dan menghayati makna esensial, makna yang esensial sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan Nilai membimbing pemenuhan kehidupan manusia melalui perluasan dan pendalaman makna yang menjamin kehidupan yang bermakna manusia (Phenix; 1964).

Pendidikan Nilai membina pribadi yang utuh, trampil berbicara, menggunakan lambang dan isyarat yang secara faktual diinformasikan dengan baik, manusia berkreasi dan menghargai estetika ditunjang oleh kehidupan yang kaya dan penuh disiplin.

Pendidikan Nilai bukanlah sebagai subject matter bukan sebagai satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa, tetapi sebagai suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan (Sastrapatedja dalam Kaswardi, 1993: 3) Dalam praktek di lapangan Pendidikan Nilai dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, sehingga setiap mata pelajaran harus ada ruh Pendidikan Nilai. Dalam proses pendidikan, Pendidikan Nilai dapat dianalogikan sebagai darah yang ada dalam tubuh manusia. Pendidikan adalah tubuh sedangkan nilai-nilai adalah darahnya. Darah itu harus ada di setiap tubuh, dan ia senantiasa mengalir dalam tubuh membawa sari-sari makanan yang diperlukan organ-organ tubuh lainnya dan mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu idealnya Pendidikan Nilai harus ada pada seluruh mata pelajaran yang diprogramkan oleh lembaga pendidikan. Senada dengan hal ini Aeni (2009) menyatakan bahwa Pendidikan Nilai di sekolah dasar tanggung jawab seluruh mata pelajaran. Setiap guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan Pendidikan Nilai kepada peserta didik, rasanya sungguh tidak bijak jika masalah penanaman nilai, moral, dan etika hanya diserahkan kepada guru PAI dan PKN. Senada dengan pendapat Mulyana (1999) bahwa pelaksanaan Pendidikan Nilai dapat dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan termasuk di dalamnya kepala sekolah dan staf administrasi. Oleh karena itu, Pendidikan Nilai dalam konteks formal memiliki dua dimensi, yaitu: (1) upaya dalam pemberian muatan kurikulum tertulis (written curriculum) dengan sejumlah bidang kajian tertentu yang bersifat normatif dan akademik, (2) upaya dalam pemberian muatan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) atas inisiatif dan komitmen pendidik. Bagi setiap guru membaca the hidden curriculum sungguh sangat penting. Sebab pengajaran harus bermula (take off) dari potret afektif anak dan kehidupan tersebut menuju target nilai yang diharapkan. Tidak setiap anak berada pada posisi nilai yang sama. Dalam setiap pengajaran seharusnya bukan hanya memberikan pengetahuan demi pemenuhan ranah kognitif (cognitive) saja, tetapi yang paling penting adalah pemenuhan terhadap aspek afeksi (affective) berupa nilai yang sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap penentuan perilaku dan kepribadian seseorang. Kosasih Djahiri (1985: 18) menyatakan bahwa wujud dari ranah afeksi adalah sikap (=penampilan kecenderungan akan sesuatu), penghayatan/cita rasa:

emosi dan feeling; kemauan; nilai dan keyakinan/belief (sebagai tingkat tertinggi yang paling mantap).

B. KONSEP MORAL DAN PENDIDIKAN MORAL

Menurut Lillie, moral berasal dari kata mores (bahasa latin) yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Dewey mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila, sedangkan Baron dkk (1980) mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Oleh Suseno (1987) dikatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Moralitas terjadi apabila orang mengambil yang terbaik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai moral (Suseno: 1987). Setiap orang pasti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap orang berpikiran kritis tentang moralnya. Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut etika (Darmodihardjo:1996).

Istilah pendidikan berasal dari kata paedagogi, dalam bahasa Yunani pae artinya anak dan ego artinya aku membimbing. Secara harafiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pematangan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis(Istiqomah, 203: 7).

Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu / seseorang. Walaupun moral itu berada dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu system yang berwujud aturan. Moral dan moralitas memiliki sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik buruk, sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruk. Dengan demikian hakikat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan.

Berkaitan dengan beberapa pengertian tentang moral tersebut di atas, Winataputra (1987) mengemukakan bahwa pendidikan moral berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan benar dan salah dalam hubungan interpersonal yang melibatkan konsep-konsep. Konsep yang dimaksud adalah tentang hak Asasi manusia, harkat dan martabat manusia, keadilan, pertimbangan, persamaan dan hubungan timbal balik. Selanjutnya dijelaskan pula tentang tujuan pendidikan moral, adalah sebagai proses membantu murid untuk lebih meningkatkan tanggung jawab, adil, dan pertimbangan yang matang terhadap dan tentang orang lain.

Dalam mensosialisasikan nilai moral perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, stakeholders pendidikan moral, dan seluruh masyarakat. Sosialisasi Pendidikan moral harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain: "Pendidikan moral adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komprehensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Sosialisasi pendidikan moral perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan pendidikan moral. Perhatian pendidikan moral harus berlangsung cukup lama (terus menerus), dan pembelajaran moral harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat (Setyo Raharjo, 2005). Pendidikan moral harus direncanakan secara matang oleh stakeholders, sebagai think-tank, baik para pakar Pendidikan moral seperti rohaniawan (tokoh agama), pemimpin non formal (tokoh masyarakat), kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid. Pendidikan moral ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan universal. Keberhasilan pendidikan moral dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang memiliki moral luhur dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (good citizen). Dalam mewujudkan kehidupan moral bagi anak usia dini perlu strategi perjuangan secara struktural dan kultural secara bersama-sama. Strategi struktural dalam arti politis, perbaikan struktural ini merupakan sarana yang paling efektif adalah melalui kurikulum pendidikan anak SD. Melalui lembaga pendidikan formal aspirasi masyarakat tentang moral dapat disalurkan, dan nilai-nilai moral dapat diperjuangkan sebagai masukan dari masyarakat kepada pemerintah khususnya Depdikbud.

C. PENDIDIKAN NILAI MORAL

Jadi, pendidikan nilai moral adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen-komponen integrasi pribadi. Integrasi pribadi dapat dilukiskan sekurang-kurangnya dengan empat gambaran kepribadian. Menurut John P. Miller (1976: 5), gambaran kepribadian menunjukkan beberapa karakteristik. Pertama, pribadi yang terintegrasikan selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya, ia memandang hidupnya sebagai suatu proses menjadi dan berusaha memilih pengalaman-pengalaman yang mengakibatkan perkembangan tersebut. Oleh karenanya, ia berani menanggung resiko dan menghadapi konflik, selagi ia tahu bahwa tanpa resiko itu perkembangannya tertahan. Dengan kata lain, ia memiliki kesadaran terhadap perubahan perkembangan yang mesti dialami.

Kedua, pribadi yang terintegrasikan memiliki kesadaran akan jati dirinya dan identitasnya. Dia dapat mengenal dan menjelaskan nilai-nilai dan keyakinan yang ia percayai dan menegaskannya secara terbuka, sejauh nilai-nilai itu menjadi kesatuan dengan jati dirinya. Walaupun ia memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain, jati diri atau identitas yang telah ia kembangkan adalah miliknya dan tidak disandarkan pada harapan orang lain atas dirinya. Jati diri yang ia miliki terbentuk dari proses kesadaran memilih dan keteguhan hatinya. Ketiga, pribadi yang terintegrasikan senantiasa terbuka dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Dia tidak memutuskan diri dari orang-orang dan dia dapat mengkomunikasikan rasa empatinya secara jelas terhadap orang lain. Dia secara efektif dapat berfungsi dalam suatu situasi kelompok. Keempat, pribadi yang terintegrasikan menggambarkan suatu kebulatan kesadaran. Dia merasakan suatu keseimbangan antara hati dan pikirannya. Ia mengalami rasa keutuhan pribadinya. Dia dapat menggunakan daya kemampuan intuisi, imajinasi, dan penalarannya.

Pendidikan nilai moral tawaran John P. Miller tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan tawaran Kohlberg. Artinya, John P. Miller pun beranggapan bahwa pendidikan nilai moral itu berfokus pada pembentukan pribadi secara integratif. Oleh karena itu, pendidikan nilai moral bersifat individualistik. Pendidikan nilai merupakan bagian dari pendidikan afeksi karena aspek sistem nilai merupakan salah satu bagian dari aspek afeksi. Selengkapannya, aspek afektif meliputi harga diri, minat, motivasi, sikap, sistem nilai, dan keyakinan (Darmiyati Zuchdi, 1997: 5).

D. KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA

Negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama membutuhkan perekat, sesuatu yang instrinsik (sesuatu yang mendasar) untuk mempersatukannya. Clifford Geertz, seorang pakar ilmu-ilmu sosial mengakui perekat itu sebagai sebuah keharusan agar terbangun bangsa yang kuat, yang dicirikan rasa kebersamaan yang hidup dikalangan warga masyarakatnya. Indonesia, menurut Geertz, masuk dalam kategori sebuah bangsa multicultural yang membutuhkan daya perekat itu. Dan para pendiri bangsa sejak awal sadar betul akan apa yang ditegaskan oleh Geertz dengan menggali nilai-nilai utama yang ada dalam masyarakat Indonesia dan menyarikan nilai-nilai ini sebagai perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadikannya sebagai pondasi relasi sosial. Sari-sari nilai utama itu tertuang dalam Pancasila. Karena itu dalam pendidikan sejak awal nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai bagian dari upaya pencerdasan bangsa. Artinya, generasi yang diharapkan terbentuk adalah generasi bangsa yang sadar akan kebangsaannya, dan bangga akan nilai-nilai yang dimilikinya, serta menghayatinya dalam kehidupan masyarakat (Sihotang, et.al: 2019).

Mata kuliah Pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan, dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga diberikan karena fakta kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa. Dengan kata lain, mata kuliah ini dihidupkan karena adanya kesenjangan antara kata/pengetahuan dan perbuatan/tingkah laku. Kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat disaksikan di semua bidang kehidupan, darisemua kelas sosial, dan di hampir semua profesi.

Pendidikan Pancasila diberikan karena kesadaran akan semakin deras arus ideology asing, khususnya kapitalisme dan neoliberalisme, yang berkat sayap raksasa globalisasi menggempur seluruh pelosok Indonesia tanpa henti. Materialisme, hedonism, konsumtivisme, serta gaya hidup yang dibentuknya telah dan sedang menerjang sudut-sudut terpencil Indonesia. Nilai-nilai asing yang sangat digandrungi remaja dan kaum muda itu dikhawatirkan akan semakin melunturkan nilai-nilai Pancasila. Sebab itu dirasakan pendidikan Pancasila sebagai suatu keharusan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman benar akan Pancasila.

Tidak disadari, sering Pancasila yang diajarkan akan Pancasila yang tidak benar, yang merupakan bentuk tersamar dari ideology yang justru bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila adalah Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara juridis - konstitusional dan obyektif - ilmiah. Secara yuridiskonstitusional Pancasila adalah dasar Negara yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Secara obyektif-ilmiah Pancasila adalah paham filsafat yang dapat diuraikan dan diterima secara rasional. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diejawantahkan dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat Satuan Perguruan Tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan Pancasila sebagai landasan pengenalan mahasiswa terhadap ideologi Negara.

Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) kemudian, dalam SK No.43/DIKTI/Kep/2006 memutuskan tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya Pendidikan Pancasila. Pertanyaannya: Pancasila yang mana? Pertanyaan ini masuk akal karena Indonesia pernah memiliki tiga UUD, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 yang memuat Pancasila pada pembukaannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.12 Tahun 1968. Inpres ini menyatakan bahwa Pancasila yang resmi adalah Pancasila yang tata urutan sila-silanya terdapat pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

RANGKUMAN

Pendidikan Nilai dapat ditarik suatu definisi Pendidikan Nilai yang mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Pendidikan moral adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperhensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Jadi, pendidikan nilai moral adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen- komponen integrasi pribadi. Integrasi pribadi dapat dilukiskan sekurang-kurangnya dengan empat gambaran kepribadian.

E. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mata kuliah umum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membekali mahasiswa untuk memahami, mengerti, dan menanamkan nilai-nilai ideology pada dirinya sebagai bekal hidup di masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa membawa perubahan yang besar bagi bangsa ini yang akan mengabdikan dimasyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya pendidikan Pancasila mempunyai visi dan misi tersendiri untuk menjadikan generasi penerus bangsa ini memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa sosial yang tinggi dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

Visi pendidikan Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan yaitu terwujudnya kepribadian *civitas akademika* yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Sedangkan, misi pendidikan pancasila sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi akademik atau misi *psikopedagogis*, menyiapkan generasi penerus bangsa untuk hidup dan berpraktek dalam masyarakat, bangsa dan negara atau misi *psikososial*, membangun budaya yang berpancasila dan beragama sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi *sosiokultural*, mengkaji dan mengembangkan pendidikan pancasila sebagai system pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetis sebagai misi akademik.

Sedangkan, tujuan Pendidikan Pancasila dalam rambu-rambu pendidikan kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, suku, kebudayaan, adat istiadat, dll. Dengan begitu, akan membuat para mahasiswa dapat secara konsisten dalam mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, cinta tanah air terhadap bangsa dan negara negeri ini, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila melalui kewarganegaraan yaitu penguasaan kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia yang memiliki pandangan intelektual yang menjadikan para mahasiswa untuk memiliki kemampuan yaitu :

1. Mengambil sikap tanggung jawab sesuai dengan hati nurani.
2. Mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta bagaimana cara-cara pemecahan masalah tersebut.
3. Mengenali perubahan-perubahan, pengembangan, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memaknai peristiwa sejarah yang terjadi dan nilai-nilai budaya bangsa ini guna menggalang persatuan bangsa.

Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu dipelajari, didalami, dihayati, dan dipahami secara benar apalagi dengan terjadinya berbagai macam tindakan, peristiwa-peristiwa yang berdampak terhadap keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia seperti berita hoax, profokasi, intoleran, ujaran kebencian, tindakan-tindakan pelanggaran etika dan moral serta hal-hal lainnya yang justru bukan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Itulah kenapa, begitu pentingnya pendidikan Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi penerus cita-cita bangsa.

F. Tujuan Pendidikan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan, perjanjian luhur atau consensus nasional bangsa Indonesia yang secara resmi tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menurut ilmu hukum telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan YME dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat, dan kepentingan diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, Pancasila harus benar-benar dapat dimengerti, dipahami, dihayati, dan selanjutnya diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara, para pelajar, dan mahasiswa dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, tujuan mempelajari pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Mengerti dan memahami arti dari isi Pancasila itu sendiri dengan sebaik-baiknya.
2. Menghayati serta mengamalkan semua sila dengan sebenar-benarnya.
3. Mengamankan dan menyelamatkan Pancasila dari berbagai ancaman dari luar maupun daridalam.
4. Mengerti dan memahami Pancasila yang nenar, berarti mengkaji hakikat Pancasila.
5. Memahami Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional secara objektif ilmiah, secara filosofis religius, maupun secara etis moral.

Mengamankan dan menyelamatkan Pancasila berarti melestarikan, menjaga, serta memelihara sesuatu dengan tetap baik , serta mencegah segala sesuatu yang merusak, mengganggu serta berlawanan dengan sesuatu yang baik.dengan demikian, Pancasila dapat benar-benar berfungsi dalam mencapai tujuan bangsa dan negara Republik Indonesia yaitu amsyarakat yang adil dan makmur.

Usaha untuk mengamankan Pancasila dapat dilakukan melalui cara yang refresif dan preventif. Secara preventif yaitu, usaha mengamankan yang bersifat pencegahan. Usaha ini pada hakikatnya merupakan usaha yang fundamental, termasuk di dalamnya terdapat keaspadaan secara terus menerus terhadap berbagai kemungkinan ancaman dalam dan luar negeri yang dapat merongrong Pancasila. Sedangkan, secara represif, dilakukan tindakan terhadap bahaya yang mengancam baikdari dalam, maupun ancaman dari luar negeri.

Tujuan Nasional Pancasila

Tujuan nasional Pancasila sebagaimana dicantumkan dalamPembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ..,memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Pembukaan itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara Negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negarabersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

G. Fungsi Pendidikan Nilai dan Moral

Dalam literature pendidikan, pendidikan lebih banyak dibahas sebagai pendidikan moral, hal ini terjadi karena tujuan pendidikan moral itu sendiri ditekankan pada metode pertimbangan moral untuk membantu mahasiswa mengenai apa yang menjadi dasar untuk menerima dan mengimplementasikan suatu nilai.

Nilai adalah salah satu objek pendidikan moral. Nilai juga merupakan segala sesuatu yang berharga. Nilai-nilai tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, diantaranya ada nilai ideal dan nilai actual. Nilai ideal adalah nilai yang menjadi cita-cita setiap orang, sedangkan nilai actual adalah nilai yang diekspresikan dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, nilai juga dapat dibedakan menjadi nilai logika, estetika, etika, agama/religius, dan hukum. Semua nilai-nilai ini menjadi acuan atau system keyakinan diri sendiri maupun kehidupan. Nilai dan moral adalah 2 hal yang saling berkaitan. Nilai-nilai moral berpusat pada hati nurani, yang harus dikembangkan melalui pendidikan nilai dan moral (*moral and value education*), atau pendidikan karakter (*character education*).

Diadakannya pendidikan nilai dan moral khususnya di perguruan tinggi berfungsi untuk membentuk karakter dan kepribadian kearah yang lebih baik bagi sesama warga negara. Diantara fungsi dan tujuan diadakannya pendidikan nilai dan moral yaitu diantaranya :

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani bagi mahasiswa sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa
4. Mengembangkan kemampuan menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.

Uraian di atas membuktikan bahwa pendidikan nilai dan moral dapat berfungsi agar menjadikan warganegara untuk dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum. Dimana nilai hukum itu sendiri lahir dari kesadaran moral masyarakat, sehingga nilai-nilai hukum sendiri masih merupakan nilai-nilai moral. Hal itu disebabkan karena ketentuan hukum yang baik, apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baik oleh masyarakat, yang dinilai melalui pertimbangan nilai dan juga moral.

RANGKUMAN

1. Mata kuliah umum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membekali mahasiswa untuk memahami, mengerti, dan menanamkan nilai-nilai ideology pada dirinya sebagai bekal hidup di masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
2. Visi pendidikan Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan yaitu terwujudnya kepribadian *civitas akademika* yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Sedangkan, misi pendidikan pancasila sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi akademik atau misi *psikopedagogis*.
3. Sedangkan, tujuan Pendidikan Pancasila dalam rambu-rambu pendidikan kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Pancasila harus benar-benar dapat dimengerti, dipahami, dihayati, dan selanjutnya diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara, para pelajar, dan mahasiswa dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Diadakannya pendidikan nilai dan moral khususnya di perguruan tinggi berfungsi untuk membentuk karakter dan kepribadian kearah yang lebih baik bagi sesama warga negara. Selain itu, pendidikan nilai dan moral juga berfungsi agar menjadikan warganegara untuk dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum. Dimana nilai hukum itu sendiri lahir dari kesadaran moral masyarakat, sehingga nilai-nilai hukum sendiri masih merupakan nilai-nilai moral.

H. HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL

Pancasila sebagai suatu sistem memiliki unsur-unsur yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari sila yang memiliki ragam makna yang berbeda, namun sistem juga memiliki kesatuan yang utuh dan bulat. Sila sila dalam pancasila saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Diantaranya pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai fungsi sebagai pedoman didalam berbangsa dan bernegara juga sebagai moral bangsa Indonesia dalam membentuk suatu Negara.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan operasional penuh dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan dengan konsep pendidikan watak kiranya kita dapat mencatat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai dan moral Pancasila dan UUD NRI 1945.
- 2) Nilai dan moral Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara sistematis dan sistemik dikembangkan dalam diri peserta didik melalui pengembangan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral setiap rumusan butir nilai yang telah dipilih sebagai substansi/konten dan pengalaman belajar (learning experiences) Pendidikan Kewarganegaraan.

I. LANDASAN UTAMA YANG DIJADIKAN PEDOMAN TUNTUNAN MENJADI WARGA NEGARA

Terdapat tiga landasan utama yang dijadikan pedoman tuntunan menjadi warga negara Indonesia, yaitu :

1. Landasaan idiil pancasila

Pancasila merupakan landasan idiil bangsa Indonesia. Ini artinya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila menjadi menjadi ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Landasan Konstitusional

Pengertian landasan Konstitusional ialah sebuah landasan negara yang berhubungan dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam hubungan Internasional yang berupa UUD 1945, lebih tepatnya dibagian Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan IV. Alinea I dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Sedangkan alinea IV dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi, "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Berdasarkan definisi landasan Konstitusional tersebut dapat kita ketahui bahwa landasan ini adalah UUD 1945.

3. Landasan Operasional

Landasan Operasional ialah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Dalam hubungan Internasional Indonesia terdapat 4 komponen landasan operasional yang meliputi:

- 1) Undang Undang. Contohnya UU No. 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri.
- 2) Ketetapan MPR mengenai GBHN yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Berdasarkan Ketetapan MPR RI No. IV tahun 1999 tentang GBHN, negara Indonesia melakukan hubungan luar negeri untuk mewujudkan politik yang bebas, aktif, berdaulat, dan bermatabat dalam menyongsong perkembangan global dan untuk mencapai kepentingan nasional.
- 3) Kebijakan Menteri luar negeri.
- 4) Kebijakan Presiden.

J. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI

Pancasila merupakan dasar perilaku manusia karena nilai yang terkandung dalam Pancasila penuh dengan nilai keagamaan, nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai kemanusiaan dan nilai keindahan hidup bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung nilai sifat hakiki manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan, selaku individu secara pribadi, individu selaku anggota masyarakat dan Negara. Di dalamnya terkandung keserasian, keselarasan dan keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara aspek material dan spiritual, antara jasmaniah dan rohaniah. Karena itu sangatlah ideal kalau Pancasila menjadi tuntutan, pedoman dan pegangan setiap individu dalam bersikap dan berperilaku sehingga tercipta kemandirian dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Pancasila dibuat untuk ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia karena pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah tertuang pada 5 sila pancasila yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan pancasila yaitu:

1. Sila ketuhanan yang maha esa

Sila ini tercermin dari bebasnya rakyat Indonesia dalam hal memeluk agama dan telah dibuat pasal dalam hal kebebasan memeluk agama yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Ini berarti tiap warga negara Indonesia telah mendapat kebebasan untuk memeluk agama sebebas bebasnya asal tidak menyimpang dari sila ketuhanan yang maha esa itu sendiri.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilandasi sikap adil dan beradab. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sila ini tercermin dengan dibuatnya pasal-pasal untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di Indonesia. Contoh pasal yang mencerminkan sila kedua yaitu pasal 28 yang berisi :

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- 2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- 5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal ini dibuat agar kemanusiaan di Indonesia dijunjung tinggi dan pemberian hukuman bagi yang melanggar sila tersebut.

3. Sila persatuan Indonesia

Yaitu sila yang dibuat agar seluruh rakyat Indonesia adalah suatu kesatuan dan bukan merupakan bangsa yang terpecah belah. Tentu saja persatuan rakyat Indonesia yang bersifat positif yang harus dijunjung tinggi. Beberapa kejadian yang mencerminkan persatuan Indonesia ialah penggalangan dana bagi bencana alam di Indonesia. Saat terjadi letusan gunung merapi misalnya, banyak sekali penggalangan bermunculan untuk meringankan beban korban bencana merapi tersebut ini menunjukkan rakyat Indonesia saling bersatu untuk saling membantu, contoh lainya yaitu program koincinta bilqis, suatu persatuan penggalangan dana untuk menyelamatkan Bilqis AnindyaPassa, bayi usia 17 bulan ini mengidap penyakit dimana saluran empedu tidak terbentuk atau tidak berkembang secara normal (Atresia Bilier). Untuk menyembuhkannya harus dilakukan operasi transplantasi hati yang membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar.

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial. Ini berarti negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Pemilihan seorang presiden dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pemilu. Ini bukti pencerminan dari sila keempat yaitu suatu negara dengan yang dipimpin oleh suatu kepala negara yang dipilih agar mendapat pemimpin yang bijaksana yang dapat memimpin Indonesia.

5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila ini menunjukkan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam masyarakat sila ini dapat tercermin dengan dibuatnya peraturan-peraturan atau norma-norma di masyarakat agar tercipta keadilan di masyarakat dan ditetapkannya hukuman bagi pelanggaran sebuah keadilan karena pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum jadi segala pelanggaran bagi seluruh isi Pancasila akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia.

Rangkuman

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, keberadaan nilai-nilai Pancasila selain sebagai pedoman dan filosofi bangsa, nilai-nilai Pancasila juga yang kemudian dijadikan landasan dalam menanamkan pendidikan nilai dan moral yang sesuai dengan butir-butir Pancasila. Generasi muda harus memiliki kemauan untuk berkontribusi membangun bangsa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, damai dan sentosa.. Untuk itu dibutuhkan motivasi dari generasi muda itu sendiri untuk membiasakan diri dengan karakter nilai-nilai Pancasila yang ada sehingga nilai-nilai Pancasila tetap terjaga dan dapat terus diwariskan kepada generasi selanjutnya.

10. Unsur-Unsur Pembelajaran Moral

Ruminiati (2007) menyatakan bahwa ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral dengan tujuan membentuk watak atau karakteristik anak. andangan lickona (1992) tersebut dikenal dengan *educating for character* atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak anak. Dalam hal ini, lickona mengacu pada pemikiran filosof Michael Novak yang berpendapat bahwa watak atau karakter seseorang dibentuk melalui 3 aspek yaitu, *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*, yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait. Ia berpendapat bahwa pembentukan karakter atau watak anak dapat dilakukan melalui 3 kerangka pikir, yaitu konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku (*moral behavior*).

Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Lickona (Suparno,dkk:2002) menekankan pentingnya memperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral, yaitu pengertian atau pemahaman moral, perasaan dan tindakan moral. Ketiga unsur ini saling berkaitan, oleh karena itu guru perlu memperhatikan ketiga unsur tersebut agar nilai moral yang ditanamkan tidak sekadar sebagai pengetahuan saja tetapi benar-benar menjadi tindakantindakan yang moral. Pengertian dan pemahaman moral adalah kesadaran moral, rasionalitas moral atau alasan mengapa seseorang harus melakukan hal itu, suatu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. Pengertian dan pemahaman moral seringkali disebut sebagai penalaran moral atau pemikiran moral atau pertimbangan moral, yang merupakan segi kognitif dari nilai moral. Segi kognitif ini perlu diajarkan kepada murid agar dapat mengerti mengapa suatu nilai perlu dilakukan.

Tindakan moral yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral ke dalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan moral ini perlu difasilitasi agar muncul dan berkembang dalam pergaulan sehari-hari. Kohlberg (1977) menyatakan bahwa penalaran atau pemikiran moral merupakan factor penentu yang melahirkan perilaku moral. Oleh karena itu untuk menemukan perilaku moral yang sebenarnya dapat ditelusuri melalui penalarannya, artinya pengukuran moral yang benar tidak sekadar mengamati perilaku moral yang tampak, tetapi harus melihat pada penalaran moral yang mendasari keputusan perilaku moral tersebut. Wahab (1997) mengemukakan bahwa untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran moral di SD, beberapa karakteristik murid SD yang penting diketahui guru dalam kaitannya

dengan model dan media pembelajaran di SD yaitu :

- a. Satuan pendidikan di SD dapat dibagi kedalam dua bagian besar yaitu kelas rendah dan kelastinggi,
- b. Murid SD cenderung untuk bermain sambil belajar,
- c. Pengetahuan yang perlu dimiliki adalah pengetahuan dan pengertian yang sederhana,
- d. Pengajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan, dan
- e. Pengalaman belajar yang baik adalah yang sarat dengan nilai.

Rangkuman

Untuk mengembangkan pendidikan moral disekolah dasar (SD) guru harus memperhatikan unsur-unsur moral yakni pengertian atau pemahaman moral, perasaan moral, tindakan moral. Disamping itu program pembelajaran moral seharusnya disesuaikan dengan karakteristik dan budaya murid.

11. Hubungan Nilai Moral dan Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harafiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pematangan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (Istiqomah, 2013: 7).

Dalam mensosialisasikan nilai **moral** perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, *stakeholders* pendidikan moral, dan seluruh masyarakat. Sosialisasi Pendidikan moral harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

“Pendidikan **moral** adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komprehensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Sosialisasi pendidikan **moral** perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan **pendidikan moral**. Perhatian pendidikan moral harus berlangsung cukup lama (terus menerus), dan pembelajaran moral harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat (Setyo Raharjo, 2005).

Dengan adanya benih nilai-nilai **nilai moral** yang sudah disemaikan dalam keluarga, diajarkan di sekolah oleh guru dan masyarakat diharapkan setiap personal dapat mempraktikkan nilai moral dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal nilai moral yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi anak-anak usia SD untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan moral dapat dimanfaatkan konsep *learning to do, learning to be, learning to know, learning to live together*.

Pendidikan moral di sekolah dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk membentuk peserta didik memiliki moral yang luhur, berakhlak mulia, agar kelak berguna bagi bangsa dan negara. Program pendidikan moral diwujudkan terintegrasi dalam semua pelajaran yang ada, agar menghasilkan warga negara yang baik (Romi Taofeqoh, 2007; 5).

Rangkuman

Pendidikan moral akan berhasil apabila, guru memberi stimulus agar anak didik memberi respon sesuai dengan keinginan pendidik, dan dengan stimulus, respon itu anak didik diberi *classical conditioning* untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih kondusif. Agar tujuan pendidikan moral dapat tercapai, guru dapat memberi hadiah kepada anak didik yang berhasil dan hukuman bagi yang gagal, namun dalam koridor memanusiakan manusia. Dalam melaksanakan pendidikan bermoral untuk mewujudkan anak SD yang ideal, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas peserta didik untuk membuat mereka sadar akan keberadaannya di dunia ini. Prinsip humanisme harus dijunjung secara otentik, bukan humanitarian. Prinsip humanisme yang ada dalam UU Sisdiknas adalah untuk mencapai manusia bermoral, bermartabat, berbudi pekerti luhur. Pendidikan moral diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citizen*) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan norma-norma sosial, aturan hukum dan nilai-nilai moral demi masa depan bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi yang bersumber pada nilai budi pekerti dan moral bangsa.

12. Pendidikan Nilai dalam Strategi Pembentukan Nilai dan Moral

Pendidikan moral adalah salah satu dimana unsur-unsur fisik, spiritual dan psikologis dirangsang dan dipandu menuju tindakan yang baik dan benar. Unsur-unsur nyata dari pendidikan moral yang dengan orang dan jiwa dalam orang tersebut. Pandangan Islam tentang moralitas sosial yang ideal bertujuan untuk membangun Islam karakter, dan dimanifestasikan dalam sebuah komunitas yang harmonis individu dalam hati dipandu untuk berinteraksi hanya dan cara-cara yang mulia.

Ada beberapa unsur-unsur dimensi manusia dipandang dari sudut psikologis dan sosiologis dalam kaitanya dengan terbentuknya karakter pada manusia. Unsur-unsur tersebut yakni :

- a. Sikap
- b. Emosi
- c. Kemauan
- d. Kepercayaan dan
- e. Kebiasaan

Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan merupakan hal yang sangat penting, karena banyak dijumpai orang berbuat dan berperilaku hanya karena kebiasaan semata-mata. Pembiasaan dapat mendorong mempercepat perilaku, dan tanpa pembiasaan hidup seseorang akan berjalan lamban, sebab sebelum melakukan sesuatu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. Metode pembiasaan perlu diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan karakter, untuk membiasakan peserta didik dengan sifat-sifat terpuji dan baik, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik terekam secara positif.

Seseorang harus di beri pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai manfaat, rasionalisasi dan akibat dari nilai baik yang dilakukan. Keyakinan merupakan wilayah psikologis yang mencakup antara lain seperti hasrat, motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. Oleh karenanya, keputusan benar-salah, baik-buruk, pada wilayah ini merupakan hasil dari proses psikologis yang di aplikasikan lewat suatu perbuatan yang sesuai dengan pilihannya.

Pola pikir yang positif terhadap nilai-nilai kebaikan akan merasakan manfaat dari berperilaku baik itu. Mulai pembiasaan, kemudian berpikir berpengetahuan tentang kebaikan, berlanjut merasa cinta kebaikan itu dan lalu tindakan pengalaman kebaikan, yang pada akhirnya membentuk karakter.

Di era modern seperti ini manusia dihadapkan persaingan yang kompetitif, oleh karena itu setiap manusia harus selalu berfikir untuk terus maju mengikuti perkembangan zaman. Setiap orang butuh keteladanan dari lingkungan sekitarnya. Manusia lebih banyak belajar dan mencontoh dari apa yang ia lihat dan alami. Karena fitrah manusia pada dasarnya ingin mencontoh. Dalam penerapan di masyarakat, menurut Kupperman nilai sebagai patokan mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif. Ia memberi penekanan pada norma sebagai factor ekstrenal yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai seorang sosiolog, Kupperman memandang norma sebagai salah satu bagian terpenting dari kehidupan sosial. Oleh karena itu, salah satu bagian terpenting dalam proses pertimbangan nilai (*value judgement*) adalah pelibatan nilai-nilai normatif yang berlaku di masyarakat.

Rangkuman

Karakter terbentuk dari pikiran, sikap, perilaku maupun tindakan yang melekat dan menyatu kuat pada diri seseorang dan karakter setiap orang berbeda-beda, tergantung aspek-aspek yang ada dalam sekitarnya dan karakter seseorang sulit sekali untuk di rubah. Nilai karakter selalu berhubungan kebaikan, keluhuran budi, akhlak mulia yang dilakukan secara terus menerus sehingga ia menjadi kebiasaan, yang akan menjadi karakter orang tersebut. adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat Dalam pembentukan karakter, kita juga harus melaksanakan secara utuh dan terus menerus, yakni dengan Habitiasi (pembiasaan), Membelajarkan hal-hal yang baik, merasakan dan mencintai yang baik, tindakan yang baik, Keteladanan dari lingkungan sekitar, Tobat (kembali) kepada Allah setelah melakukan kesalahan.

1. Dalam pendidikan nilai mempertimbangkan objek dalam mencapai sudut pandang keindahan selera pribadi. Dari pernyataan diatas yang sesuai adalah....

- A. Sudut moral dan sudut pandang non moral
- B. Sudut moral dan estetika
- C. Sudut pandang moral dan etika
- D. Sudut nilai dan sudut moral

2. Pendidikan moral ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan universal. Dengan hal ini keberhasilan pendidikan moral akan memiliki keluaran peserta didik dengan kompetensiyaitu.....

- A. Kompetensi struktural dan kultural
- B. Kompetensi personal dan sosial
- C. Kompetensi efektif dan kultural
- D. Kompetensi personal dan struktural
- E. Kompetensi formal dan universal

3. Harga, makna Istiqomah dan pesan semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta konsep dan teori sehingga bermakna secara fungsional dalam pernyataan diatas termasuk pengertian nilai dari.....

- A. Sastrapratedja (1993)
- B. Hakam (2000)
- C. Winecoff (1985)
- D. Phenix(1964)

E. Djahri(1999)

4. Setiap orang pasti mempunyai moral, tetap tapi belum tentu setiap orang berpikir kritis tentangmoral, dan pemikiran yang kritis tentang moral yang disebut.....

A. Komitmen

B. Afeksi

C. Etika

D. Moralitas

E. Normatif

5. Sesuai dengan visi pendidikan Pancasila dengan melalui pendidikan kewarganegaraanperlunya kepribadian yang harus dibentuk yaitu.....

A. Civitas akademika

B. Psikososial

C. Psikopedagogis

D. Sosial kultural

E. Civitas sosial

6. Sangat penting untuk memahami mengerti dan menanamkan nilai-nilai ideologi pada diri masyarakat sesuai dengan kompetensi masing-masing salah satunya mahasiswa sebagai generasi muda yang membawa perubahan besar salah satu visi dan misi dalam pendidikan Pancasila. Berikut salah satu visi dan misi yang tepat yaitu.....

A. Memiliki sifat patriotisme dalam membela bangsa

B. Berani bertindak dalam membela kebenaran

C. Memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa sosial

D. Memiliki hati yang berjiwa sosial dan pembela bangsa

E. Menanamkan nilai ideologi dalam diri sendiri dan cinta tanah air

7. Perlunya sosialisasi pendidikan moral harus dengan mengikuti prinsip-prinsip di dalam pendidikan moral yaitu....

- A. Pendidikan moral adalah suatu proses pendekatan yang digunakan secara komprehensif
- B. Pendidikan moral adalah suatu proses pendekatan yang digunakan secara teratur
- C. Pendidikan moral adalah suatu proses pendekatan yang digunakan secara mandiri
- D. Pendidikan moral adalah suatu proses pendekatan yang digunakan secara universal
- E. Pendidikan moral adalah suatu proses pendekatan yang digunakan secara efektif

8. Perhatikan pernyataan berikut!

Pendidikan nilai dan moral adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen integrasi pribadi yang integrasi pribadi dapat dilukiskan sekurang-kurangnya dengan empat gambaran pribadi. pernyataan tersebut sesuai pendapat menurut.....

- A. Setyo Raharjo (2005)
- B. Winataputra (1987)
- C. Wellen (1997)
- D. John p Miller (1976)
- E. Istiqomah (2005)

9. Dalam pendidikan moral John pemilu beranggapan bahwa pendidikan nilai moral berfokus dengan membentuk pribadi secara integratif dengan hal ini pendidikan moral harus memiliki atauberifat.....

- A. Universal
- B. Kognitif
- C. Individual
- D. Permanen
- E. Penalaran

10. Sesuai ketentuan sebagai mengatakan serta menyelamatkan Pancasila hal yang perlu dilakukan atau upaya dari ancaman atau bahaya dari luar maupun di dalam negeri yaitu.....

A. Preventif

B. Represif

C. Pencegahan

D. Education

E. Pertimbangan

Essai

1. Dalam membangun budaya yang ber Pancasila dan bersama dan dibutuhkan kehidupan atau misi sosial kultural dan mengatasi pengembangan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi di dalam hal itu pendidikan Pancasila diperlukan disiplin ilmu dan tujuan.
 - a. Bagaimana tujuan pendidikan Pancasila sebagai pengarah dalam memajukan bangsa?
 - b. Dan bagaimana seorang pendidik mengembangkan pendidikan Pancasila pada peserta didik?
2. Dalam mengupayakan peran penting pendidikan moral diperlukan hal ini.diperlukan untuk membekali mahasiswa memahami mengerti dan menilai, ideologi dan hal ini perlunya fungsi dantujuan.
 - a. Dalam hal ini Jelaskan tujuan pendidikan moral dalam rambu-rambu pendidikan?
 - b. Dan bagaimana fungsi dalam pendidikan moral khususnya perguruan tinggi?
3. Pendidikan nilai moral berusaha mengembangkan komponen-komponen integrasi pribadi.Dengan dilukis sekurang-kurangnya dengan 4 gambaran pribadi.
 - a. Jelaskan hal apa saja gambaran pribadi untuk menunjukkan karakteristik pada pendidikannilai dan moral?
 - b. Dan bagaimana hasil pendidikan nilai moral yang ditawarkan oleh John Miller?
4. Mengapa pendidikan moral sangat penting ditanamkan sejak usia dini? Dan bagaimana jika anak mengalami broken home dikeluarganya sehingga ia kurang mendapatkan pendidikan moralnya? Bagaimana tanggapan kalian?
5. Di dalam proses Pendidikan Nilai, bagaimana tindakan-tindakan pendidikan yang lebihspesifik dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih khusus ?

UNIT 2

1. Sistem di Indonesia terutama pendidikan nasional sebagai landasan operasional penuh dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan diatur pasal

- A. Pasal 3 ayat 2
- B. Pasal 2 ayat 3
- C. Pasal 2 ayat 2
- D. Pasal 3 ayat 3
- E. Pasal 2 ayat 1

2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata pembelajaran yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral dan pada akhirnya akan bermuara pengembangan watak dan karakter peserta didik hal ini merujuk pada nilai.....

- A. Pancasila dan UU pasal 3 ayat 2
- B. UUD 1945 dan UU pasal 2 ayat 1
- C. UU no 20 tahun 2003 dan UUD 1945
- D. UUD 1945 dan Pancasila
- E. UU no 12 tahun 2011 dan Pancasila

3. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mengandung dasar perilaku manusia. Dalam pernyataan diatas yang termasuk dalam nilai pada Pancasila yaitu.....

- A. Nilai kebenaran, agama, kebaikan, kemanusiaan, keindahan
- B. Nilai perjuangan, kebenaran, agama, kemanusiaan, kebaikan
- C. Nilai kebenaran, perjuangan, nilai pemersatu, nilai keindahan
- D. Nilai kebenaran, nilai agama, kebaikan, kemanusiaan, ketelitian
- E. Nilai perjuangan, agama, benaran, kemanusiaan, kebaikan

4. Makna Pancasila yang berkaitan sila pertama pada pendidikan moral adalah kecuali.....

- A. Hak untuk hidup
- B. Hak kemerdekaan
- C. Hak beragama
- D. Hak bersatu
- E. Hak untuk tidak disiksa

5. Dalam ayat berapa yang menjelaskan sila ini tercermin dari bebasnya rakyat Indonesia dalam hak memeluk agama dan telah dibuat pada pasal.....

- A. 29 ayat 2 dan 3
- B. 29 ayat 1 dan 2
- C. 29 ayat 3 dan 1
- D. 28 ayat 1 dan 2
- E. 28 ayat 2 dan 3

6. Ruminati(2007) menyatakan bahwa ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral dengan memiliki tujuan yaitu.....

- A. Membentuk kepercayaan diri dan mandiri
- B. Membentuk watak dan karakteristik anak
- C. Membentuk kepribadian dan watak
- D. Membentuk kemandirian dan karakteristik anak
- E. Membentuk karakteristik anak dan kepercayaan diri

7. Suatu hal apa pada segi ini yang harus diajarkan kepada peserta didik agar dapat mengerti mengapa suatu hal nilai perlu dilakukan?

- A. Segi universal
- B. segi moral
- C. Segi kognitif
- D. Sedih penalaran
- E. Segi perilaku

8. Dalam menemukan perilaku moral yang sebenarnya. Faktor apa yang menentukan lahirnyaperilaku moral?

- A. Penalaran
- B. Pemahaman
- C. Kognitif
- D. Perilaku
- E. Sifat manusia

9. Karakteristik pada murid dapat diketahui dengan dipahami pendidik juga harusmenggolongkan siswa dalam segi?

- A. Jarak dan waktu
- B. Tinggi badan
- C. Tingkat kelas rendah dan tinggi
- D. Jarak kelahiran
- E. Tinggi kemampuan peserta didik

10. Hal apa dalam pembentuk karakter atau watak anak dalam kerangka pikiran.....

- A. Moral, universal, sosial
- B. Konsep moral sikap moral, perilaku moral
- C. Knowing, sikap moral, sosial
- D. Perilaku moral, perilaku sosial, sikap moral.

Essai

1. Dalam berpendapat bahwa watak seseorang saling berhubungan dan saling terkait satu sama lain. Dalam hal ini pendidik harus mengenali satu dengan yang lain dengan 3 aspek.
 - a. Jelaskan 3 aspek pembentuk karakter seseorang?
 - b. Dan berikan pendapat kalian mengapa perlu ditanamkan kepada peserta didik?
2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral memiliki landasan pedoman dalam tuntutan menjadi warga negara.
 - a. Dalam kaitannya tiga landasan utama. landasan apa yang harus dibutuhkan ?
 - b. Serta jelaskan 4 komponen landasan operasional yang diperlukan?
3. Dalam hal ini untuk memudahkan pendidik diperlukan pembelajaran moral, dan beberapa karakteristik peserta didik yang perlu diketahui.
 - a. Apakah kaitan pendidik dengan modal dan pembelajaran? Jelaskan!
 - b. Dan bagaimana pendidik mengembangkan pendidikan moral?
 - c. Serta mengapa tujuan pendidikan nilai perlu dibentuk?
4. Dalam pendidikan nilai dan moral banyak hal yang dapat terjadi terutama di lingkungan sekitar.
 - a. Apa yang menjadi penyebab pendidikan nilai dan moral?
 - b. Dan hal apa yang menjadi pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan saling terkait satu sama lain?
5. Pancasila merupakan lambang Negara, dan menjadi semboyan Negara. Berikan contoh penerapan nilai-nilai pancasila yang sering kita jumpai dalam lingkungan keluarga dan masyarakat!

Isu Pendidikan Nilai Moral di Indonesia

Persoalan pembenahan pendidikan nilai dan moral sangat bergantung pada kurikulum yang berlaku saat ini. Praktik yang terjadi mengenai sistem pendidikan nasional pada orde baru terutama pendidikan nilai hanya mampu menghasilkan berbagai sikap dan perilaku manusia yang nyata-nyata malah betolak belakang dari apa yang diajarkan. Di contohkan bagaimana pendidikan kewarganegaraan (PKN) dan agama, dua jenis mata pelajaran yang mengajarkan tentang nilai ini ternyata belum cukup berhasil menanamkan sejumlah nilai moral dan humanism kedalam diri peserta didik.

Pendidikan nilai tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, tetapi dapat juga dilakukan di lingkup keluarga dan masyarakat yang mencakup teman sebaya dan media massa. Banyak penelitian yang terkait dengan lingkungan dan pembentukan karakter. Dikutip dari (*penelitian oleh Alit (2003), Kayan (2001), Bulach (2002), Hendrix, dkk 2004*) menyimpulkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak usia sekolah. Lingkungan yang positif dapat membentuk pribadi yang berkarater positif, dan sebaliknya lingkungan yang negatif akan membentuk pribadi yang negatif pula. Akan tetapi, semua kepribadian itu tergantung dari bagaimana diri kita mensikapinya.

A. Rubrik penilaian keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok

No	Aspek Yang Diukur	SKALA				
		1	2	3	4	5
1	Sikap peserta didik dalam menerima pendapat					
2	Sikap peserta didik dalam menerima kritikan					
3	Kesopanan peserta didik dalam mengkritik					
4	Kemauan peserta didik dalam menolong kesulitan Temannya					
5	Kesabaran dalam mendengarkan pendapat orang Lain					
6	Keaktifan dalam berpendapat					

B. Rubrik penilaian hasil pekerjaan kelompok

No	Aspek Yang Diukur	Skor Maksimum	Skor Perolehan Kelompok
1	Hasil pekerjaan sesuai petunjuk	1	
2	Jawaban tepat sesuai pertanyaan	2	
3	Jawaban tidak berbelit-belit	2	
4	Hasil pekerjaan di tulis tangan	3	
5	Hasil pekerjaan dikumpulkan tepat waktu	2	

$$NA = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan} \times 10}{10}$$

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni Ani Nur. *Pendidikan Nilai Di Sekolah Dasar*.
- Agustang, A., & Asrifan, A. (2021). PERAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA, diakses pada 15 November 2021
- Ahmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), Cet. 1. hlm. 9.
- Arif. 2011. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. Yogyakarta: STMIK AMIKOM JOGJAKARTA
- BPIP.(2021) Ingat, Pancasila Merupakan Landasan Idiil Bangsa Indonesia. Tersedia [online text] BPIP :: Ingat, Pancasila Merupakan Landasan Idiil Bangsa Indonesia (15/11/2021).
- Halim, A., Mentari, A., & Yanzi, H. (2019). URGENSI MATA KULIAH UMUM PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENANAMKAN NILAI MORAL BUDAYA BANGSA PADA MAHASISWA MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0, diakses pada 15 November 2021
- Ishaq, H., & SH, M. (2021). Pendidikan Pancasila. Prenada Media, diakses pada 15 November 2021
- Kahfi. Bilal. (2021). Pengertian Landasan Idiil, Konstitusional dan Landasan Operasional. Tersedia [online text] Pengertian Landasan Idiil, Konstitusional dan Landasan Operasional – Anto Tunggal (15/11/2021).
- Kelompok Kompetensi G.(2016). Guru Pembelajar: Modul Pelatihan Sd Kelas Tinggi. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. Rahman.
- Kusrahmadi Sigit Dwi. *Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Anak Sekolah Dasar*
- Mohammad Chowdhury, Emphasizing Morals, Values, Ethics, And Character Education in Science Education And Science Teaching, dalam Mojess Journal: Journal of Ecational Science, Malaysia Online Journal, Vol. 4, Issue 2, 2016. hlm. 4.
- Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 167

- Nurfaizah A.P. (2017). *Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai Moral di Sekolah Dasar. Jurnal Publikasi Pendidikan* <http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend> Volume 7 Nomor 2, Juni 2017 p-ISSN 2088-2092 e-ISSN 2548-6721.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. CV. Mitra Cendekia Media.
diakses pada 15 November 2021
- Putri Nova Mulia. (2021). *Menelusuri Konsep Dan Urgensi Pendidikan Pancasila*.
- Setyo Raharjo. (2005). *Pendidikan Multi Kultural*. Yogyakarta: FIP, UNY
- Sudiati. *Pendidikan Nilai Moral Ditinjau Dari Perspektif Global*. Yogyakarta: FBS, UNY
- Suradi, L. (2020). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK (SMART AND GOOD CITIZEN). SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 14(2), 112-121.
diakses pada 15 November 2021